

PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI PESANTREN

Hamam Burhanuddin
STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi
E-mail: hmmudin@yahoo.com

Abstract: Gender in Pesantren become interesting issue to be studied, Islam teaches about equality (musawamah) means similarity conditions for men and women as well as the opportunity to obtain their rights as human beings, to be able to contribute and participate in political activities, law, economics, social, cultural, educational. Gender equality also includes the elimination of discrimination and structural, both men and women. The realization of gender equality is characterized by the absence of discrimination between women and men, and they have access, to participate and control over the development and the benefits equal and fair share of development, in this study the authors examine gender from the standpoint of education, Islamic concepts offered are al musawamah, al 'adalah, tawazun, tawasut, taadud, al 'adalah, tahiyah, ukhuwah. There are can be applied in education in Pesantren. Some discourse underlying the need for educational efforts to socialize gender perspective, namely as awareness efforts against injustice in social life. Gender socializing can be started from several educational institutions, both formal and non-formal, one of them through education in schools.

Keywords: education, gender perspective, pesantren

Pendahuluan

Kaum perempuan seringkali kurang mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena masih lekatnya ketidakadilan gender dalam masyarakat yang terjemakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan yang bersifat menyepelkan (tidak penting) kepada kaum perempuan, bahkan kekerasan (*violence*) termasuk pekerjaan yang lebih banyak (*double burden*).¹

Mengapa terjadi perbedaan gender? karena oleh banyak hal diantaranya : dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Bentuk ketidakadilan gender ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain, karena saling berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena *stereotype* tertentu atas kaum

¹Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 12.

perempuan bahwa perempuan itu lemah dan tenaganya murah, yang semuanya itu justru ikut mendukung kepada subordinasi, kekerasan kepada perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan ke dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan itu sendiri.²

Begitu juga bidang keagamaan, khususnya masyarakat Islam. Fenomena ketidakadilan gender dalam Islam ternyata lebih menunjukkan adanya ketidaksewenangan dan penindasan terhadap kaum perempuan, hal ini merupakan akibat pola budaya dan sistem masyarakat muslim yang mayoritas bercorak patriarkal, struktural dan subordinatif, dapat dilihat dalam sejarah masyarakat muslim. Sempitnya ruang gerak bagi kaum perempuan muslim terjadi justru setelah Islam mengalami perkembangan pesat dengan wilayah kekuasaan luas. Masyarakat muslim Arab pra-Islam dan Islam masa awal, kaum perempuan pada umumnya dapat beraktualisasi secara bebas, pada giliran selanjutnya, terjadi pergeseran pandangan terhadap perempuan karena interaksi budaya, kepentingan politik, ekonomi dan interpretasi terhadap teks-teks Quran.³

Faktor *sosio-antropologis* sesungguhnya mempunyai peran yang cukup dominan, memunculkan paradigma yang bersifat patriarkhis, genderis, seksis bahkan sikap-sikap yang mencerminkan *misoginisme*. Sikap misoginis yang dimaksud berupa kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang dipersamakan dengan perempuan. Konteks historis, sikap-sikap ini telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya. Penolakan Islam oleh masyarakat Arab merupakan penolakan atas moralitas yang dinilai telah menghapuskan simbol-simbol superioritas kekuasaan laki-laki.⁴

Beberapa wacana yang melatarbelakangi perlu adanya upaya mensosialisasikan pendidikan berperspektif gender, yakni sebagai upaya penyadaran terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Mensosialisasikan gender bisa dimulai dari beberapa lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, salah satunya lewat pendidikan di pesantren.

Pondok pesantren misalnya telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan merupakan

²Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Istiqro' Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 02, Nomor, 01, 2003. 115.

³*Ibid*, hlm. 116.

⁴Aminah Wadud Muhsin, *Wanita Dalam al-Quran*, (Bandung: Pustaka, 1994), 1-2.

subkultur masyarakat Indonesia.⁵ Banyaknya pesantren di Indonesia, serta besarnya siswa pada tiap pesantren menjadikan pesantren sebagai lembaga yang layak diperhitungkan, kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandanginya.

Salah satu yang menyebabkan pesantren menjadi penting untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan karena jangkauannya yang tidak sekadar merambah ranah persekolahan. Padahal pesantren memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekadar training di dalam kelas.

Untuk itu diperlukan pengenalan terhadap wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren, terutama kyai menjadi pilar utama gender mainstreaming, gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pandangan-pandangan yang bias gender telah mengakar dalam wacana dan praktik keberagamaan tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar atau didekonstruksi jika peran-peran dari tiap elemen masyarakat terutama kyai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan.

Para kyai dengan kelebihan pemahamannya terhadap masalah-masalah agama, seringkali dilihat sebagai orang yang selalu dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh orang awam. Pemindahan kompetensi di bidang agama ke tangan para kyai dalam suatu masyarakat bukan merupakan suatu realitas yang muncul dengan tiba-tiba, melainkan sudah melalui historisisme seusia dengan umur masyarakat itu sendiri.⁶

Masyarakat pesantren yang pada umumnya masih menganut budaya *paternalistik*, contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholkhah (2004), bahwa salah satu kelemahan pesantren (tradisional) aspek kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yang berpusat pada kyai, yang menjadikannya (pesantren) laksana 'kerajaan kecil' di mana kyai merupakan sumber mutlak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di

⁵Abdurrahman Wahid, *Pesantren sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 39.

⁶Zamaksyari Dofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 55-60.

lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya.⁷

Kondisi yang harus diupayakan, yaitu kyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender. Untuk membukakan pikiran dan nurani adanya persoalan tersebut. Persoalan gender merupakan persoalan budaya, untuk memahami wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren peran kyai sangat dibutuhkan dan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara *konfrontatif* berjangka waktu pendek. Hal ini pun dapat terkendala, seperti yang dikemukakan Nurcholis Majid, manakala sang kyai memiliki ketetapan yang sangat kuat tidak mengubah pesantrennya mengikuti perkembangan zaman, yang pada umumnya terjadi pada kyai-kyai yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu.

Setelah kyai, ustadz dan ustadzah menjadi sasaran kedua untuk memahami pendidikan berperspektif gender di pesantren. Jika kyai, nyai ustadz dan ustadzah sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender, komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan memahami persoalan gender akan jauh lebih mudah dicapai. Dari latarbelakang itulah apakah gender di pesantren bisa dilaksanakan secara praktis? Ataukah sekedar sebuah wacana belaka? Bagaimana kondisi meskipun sudah banyak dibahas dan diteliti tetapi pendidikan gender di pesantren masih sangat relevan dengan tuntutan zaman sekarang ini.

Konsep Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin⁸ kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang juga mempunyai arti jenis kelamin. Jenis kelamin dan gender tak serasi untuk hidup bersisian di semesta konseptual yang sama.⁹ Jenis kelamin (*sex*) adalah ketentuan dari Tuhan sehingga seseorang tidak dapat merubahnya dan bersifat universal. Ciri-cirinya secara biologis, kalau pria memiliki alat kelamin yang disebut penis dan alat kelamin wanita yang disebut vagina. Sejak lahir sampai meninggal dunia, pria akan tetap berjenis kelamin pria dan wanita akan tetap berjenis kelamin wanita (kecuali dioperasi untuk berganti

⁷ Imam Tholikhah, dkk., *Membuka Jendela Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 265.

⁹ Ivan Illich, *Matinya Gender*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1982), 89.

jenis kelamin). Ini artinya, antara pria dengan wanita tidak dapat saling tukar jenis kelamin.

Sedangkan gender adalah atribut sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Gender bersifat tidak universal, dalam arti dapat berubah-ubah tergantung masyarakatnya atau lingkungan yang mempengaruhinya. Contoh peran gender yang dapat ditukarkan antara pria dengan wanita sebagai berikut. Memasak, bekerja, mencuci pakaian atau alat-alat rumah tangga dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh wanita (ibu) dapat digantikan oleh pria (ayah).

Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah interpretasi budaya terhadap jenis kelamin.¹⁰ Sedangkan menurut Moh. Yasir Alimi, gender adalah atribut yang dilekatkan, dimodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada laki-laki dan perempuan. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan.¹¹

Gender dalam Tinjauan Teologis

Setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup bukan saja antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan alam semesta ini.¹² Agama Islam, Yahudi, dan Kristen sepakat pada satu fakta dasar, yakni bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan, Pencipta Alam Semesta. Akan tetapi mereka berselisih paham tentang penciptaan hawa.¹³

Gambaran hawa sebagai penggoda seperti tercantum dalam Bibel telah berdampak negatif terhadap laki-laki dan perempuan. Semua wanita dipercaya mewarisi tingkah laku dari ibunya, yakni Hawa menurut Bibel, baik kesalahan maupun tipu muslihat Hawa. Akibatnya, semua wanita lalu dianggap tidak dapat dipercaya, bermoral rendah, dan jahat. Menstruasi, kehamilan, dan melahirkan dianggap sebagai hukuman yang adil bagi kesalahan abadi bagi wanita terkutuk itu. Hingga saat ini, orang yahudi ortodoks dalam setiap kali berdoa mengatakan;

¹⁰ Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Jender", Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Jilid. 2, (Yogyakarta: Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), 3.

¹¹ Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 3.

¹² Abd. Rohim Ghazali, "Inklusifitas Kebenaran Agama", *Atas Nama Agama dalam Dialog Bebas Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 51.

¹³ Sheriff Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, terj. Sri Suhandjati dan Rusman, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 2.

“Terima kasih kepada Tuhan, Raja Alam Semesta, Yang tidak menjadikan kami seorang wanita”.¹⁴

Agama Islam adalah agama Allah yang diperintahkan-Nya untuk mengajarkannya tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk melaksanakannya.¹⁵ Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan.

Perbedaan yang digaribawahi dan yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, yang artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁷ (QS. Al-Hujarat : 13).¹⁸

Adapun *asbabun nuzul* ayat di atas, dalam suatu riwayat, dikemukakan, ketika *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah), Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Beberapa orang berkata: “Apakah pantas budak hitam ini adzan di atas Ka'bah?” Maka berkatalah yang lainnya: “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia menggantinya”. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Islam

¹⁴ Suherman Rosyidi, *Wanita dalam Doktrin Islam, Yahudi dan Kristen*, (Surabaya; Target Press, 2000), hlm. 10.

¹⁵ Marhumah, “*Anjuran Menikah*”, Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (eds.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rohmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Sunan Kalijogo Yogyakarta dan The ford Foundation, 2003), 1.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, “Konsep Wanita menurut Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam”, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual; Kumpulan Makalah Seminar*, (Jakarta: INIS, 1993), 3.

¹⁷ Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya sebagian dari laki-laki dan perempuan saling mengenal dari sebagian yang lain bukan untuk saling membaggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal apa yang tersimpan di dalam batin makhluk-Nya. (Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Offset, 1990), hlm. 2238.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alwaah, 1997), 847.

tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling takwa.¹⁹

Jelaslah bahwa pandangan al-Qur'an mengenai perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Mereka berdua adalah makhluk Allah. Sebagaimana gambaran realisasi ajaran kesetaraan yang dipelopori oleh Rasulullah bahwa Nabi Muhammad sebagai figur sentral dalam sejarah umat Islam telah melakukan dekonstruksi terhadap budaya Arab yang patriarkis menjadi budaya egaliter dengan menempatkan posisi perempuan sebagai pelaku utama sejarah di samping laki-laki.

Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi Rasulullah dalam mencabut akar budaya patriarki yang telah terhumam begitu kuat di tengah masyarakat Arab.²⁰ Meskipun demikian, budaya patriarki masih bisa dirasakan. Hal seperti ini disebabkan fiqh sebagai hasil proses *istinbat* hukum, adalah penafsiran secara sosio-kultural terhadap dalil-dalil nas al-Qur'an dan al-Hadits. Karena fiqh yang tersusun dalam kitab-kitab fiqh, merupakan produk pemikiran ulama yang tidak terlepas dari konteks sosial dan masyarakatnya, dan sekaligus sebagai respon yuridis terhadap persoalan hukum yang muncul dalam realitas empirik. Di sinilah kebudayaan ikut membentuk karakter dan corak fiqh. Di mana kebudayaan adalah merupakan tujuan utama setiap kekuatan sosial politik, keagamaan atau kekuatan lainnya. Apalagi dalam perspektif politik tidak terpungkiri bahwa kemunculan fiqh juga kadang bermuatan politik, artinya terkait dengan kepentingan dari perbuatannya sendiri atau kekuatan-kekuatan yang melingkupinya.

Di sisi lain yang menggunakan dalil-dalil agama untuk memperkuat pandangan atau sikapnya yang mengarah pada subordinasi atau marginalisasi perempuan. Adanya doktriner yang turut mempengaruhi terbentuknya pandangan yang bias gender mengharuskan para pemeluk agama untuk bersikap kritis dalam memahami ajaran agama yang terkesan bias gender tersebut tentunya bukan dengan menyalahkan teks kitab suci yang terkesan bias gender, karena hal itu sama artinya dengan mengingkari firman yang suci. Oleh karena itu, jika menemukan teks yang bias gender, yang perlu dilakukan adalah mencari penafsiran konseptual yang dapat memperjelas makna-makna dari teks-teks yang terkesan bias gender itu.

¹⁹ Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, A. Dahlan dan M. Zaka al-Farisi (eds.), (Bandung: Diponegoro, 2000), 518.

²⁰ Sri Suhandjati Sukri, "Dialog Islam dengan Budaya Lokal Implikasinya Terhadap Penulisan Sejarah *Androginis*", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam Disampaikan di Hadapan Senat Terbuka IAIN Walisongo, Semarang, 30 April 2005, 6.

Gender dalam Tinjauan Psikologis

Pembagian spesies manusia ke dalam dua kategori fundamental itu dirasakan pada jenis kelamin atau perbedaan biologis. Pada perkembangannya, masyarakat mengelaborasi fakta biologis ini ke dalam terminologi sekunder nonbiologis, yaitu “maskulinitas” dan “feminitas”. Konsep-konsep itu tidak merujuk pada jenis kelamin, tetapi gender perbedaan-perbedaan yang secara kultural dipelajari antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender semata-mata merujuk pada karakteristik-karakteristik sosial, seperti perbedaan gaya rambut, pola pakaian, jenis pekerjaan, dan aktivitas lain yang secara kultural dipelajari.

Masyarakat cenderung mengasumsikan bahwa maskulinitas adalah bagian dari “keadaan alamiah manusia” atau takdir, sebagaimana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat mengharapkan pula agar laki-laki dan perempuan memainkan peran-peran gender yang spesifik, yaitu pola, perilaku, kewajiban, yang dianggap pantas untuk masing-masing jenis kelamin.

Karena status sosial dari kedua jenis kelamin itu biasanya tidak sama, peran-peran gender ini pun cenderung merefleksikan (dan memperkuat) stratifikasi jenis kelamin yang sudah ada.²¹ Melihat fenomena perbedaan yang tampak dari pengamatan sehari-hari pada orang dewasa tidaklah tepat karena mereka sudah mengalami sosialisasi yang mempengaruhi perkembangannya. Oleh karena itu, para psikolog lebih cenderung mempelajari bayi yang belum dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial. Banyak studi pada bayi yang menyatakan bahwa ada perbedaan kepribadian yang dapat dihubungkan dengan jenis kelamin.²²

²¹ Achmad Gunaryo, “Kesetaraan Jender: Antara Cita dan Fakta”, Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 3-4.

²² Di dalam ayunan, misalnya, bayi laki-laki umumnya lebih aktif daripada bayi perempuan. Sementara itu, bayi perempuan lebih banyak senyum, sensitif terhadap kehangatan dan sentuhan daripada bayi laki-laki. Namun, fakta ini hanyalah merupakan kecenderungan umum. Hal itu karena, ditemukan juga bukti-bukti lain yang didukung oleh argumentasi bahwa tidak mungkin bayi semuda apa pun yang tidak merasakan pengaruh di sekitarnya. Semenjak dilahirkan, bayi telah menerima perlakuan dari orang tuanya, yang dengan secara langsung, didasarkan pada kesadaran jenis kelamin. Orang tua biasanya memegang bayi perempuan dengan hangat dan halus. Sementara itu, terhadap bayi laki-laki orang tua cenderung memiliki toleransi terhadap kenakalannya, dan sebagainya. Banyak ibu yang baru saja melahirkan dan diberi tahu bahwa bayinya adalah laki-laki, meskipun perempuan, memperlakukan bayi itu sebagai laki-laki. Berdasarkan fakta-fakta itu, bayi dapat mempelajari perilaku secara berbeda pada usia beberapa minggu pertama kelahirannya. Jadi, jika gender ditentukan oleh fakto-faktor biologis, logisnya, tidak mungkin mensosialisasikan seorang anak ke dalam peran yang salah. Oleh karena itu, manusia adalah *psychosexually neuter at birth* dan bahwa gender tidak tergantung pada jenis kelamin *Ibid.*, 7-8.

Gender dalam Tinjauan Biologis

Organ reproduksi manusia ditentukan oleh faktor organ penentu jenis kelamin yang biasa disebut *gonad*, laki-laki memiliki buah pelir (*testis*) dan perempuan memiliki ovarium. Disamping itu, Laki-laki dan perempuan mempunyai kromosom seksual yang berbeda. Perempuan mempunyai dua kromosom yang sejenis, yaitu; XX, karenanya disebut *homogametic sex*, dan laki-laki mempunyai dua kromosom yang berbeda; satu diantaranya sama dengan perempuan, X dan lainnya, Y, khusus bagi laki-laki. Laki-laki disebut *heterogametic sex* karena mempunyai dua jenis kromosom (XY). Terlepas dari kromosom X dan kromosom Y, sel telur dan sperma mengandung satu set kesamaan dari dalam tubuh. Mengenai masalah keturunan, hukum Mendel menunjukkan bahwa ayah dan ibu memainkan peran yang sama.²³ Meskipun demikian, Kromosom X dan kromosom Y dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan fisik biologis, seperti laki-laki mempunyai suara yang lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping, dada yang datar. Sementara perempuan mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih lebar, dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki.²⁴

Terjadinya menstruasi tiap bulan pada wanita misalnya, dapat dijadikan bukti yang signifikan adanya perbedaan tersebut. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa organ-organ tertentu di dalam tubuh wanita sangat berbeda dari yang ada pada pria, seperti organ reproduksi. Hal ini dapat dimaklumi karena fungsi organ tersebut memang berbeda antara dua jenis kelamin. Wanita melahirkan anak, sedang pria, tidak. Tetapi, pada organ-organ yang fungsinya tidak berbeda, seperti tangan, kaki, alat pencernaan, otak, jantung, dan sebagainya, maka konstruksi dan bentuknya secara umum juga berbeda antara pria dan wanita.²⁵

Gender dalam Tinjauan Sosiologis

Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu proses dimana seorang anggota masyarakat yang baru (misalnya seorang bayi) akan mempelajari norma-

²³ Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Terj. Toni B. Febriantono, (Jakarta: Pustaka Proemethea, 2003), 14.

²⁴ Nasaruddin Umar, "Teologi Reproduksi", Sri Suhandjati Sukri (ed.), dalam *Bias Jender...op. cit.*, 24.

²⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*, Ahmad Baidhawi (ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 24.

norma dan kebudayaan di mana dia menjadi anggotanya.²⁶ Di samping itu, setiap masyarakat manusia selama hidup pasti akan mengalami perubahan. Perempuan, dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan minor dan dipandang negatif oleh struktur budaya, politik dan peradaban. Hanya sedikit masyarakat di belahan dunia ini yang memberikan ruang yang baik bagi perempuan.²⁷ Di mana gambaran mengenai kedudukan dan peran perempuan Jawa di masa lalu, tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain yang menganut sistem patriarki.²⁸ Budaya patriarki terjadi karena adanya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Kelompok pertama tidak saja berkuasa secara fisik terhadap kelompok kedua, tetapi juga menentukan ideologi budaya yang melanggengkan kekuasaannya.²⁹

Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.³⁰ Seperti di kalangan masyarakat Jawa, perempuan di kenal sebagai *konco wingking* yang berarti teman belakang.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tempatnya bukan di depan sejajar dengan laki-laki, tetapi di belakang yaitu di dapur. Kegiatan perempuan hanya di seputar dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami). Pemetaan wilayah kerja semacam itu, kemudian dirangkaikan dengan tugas perempuan yaitu *macak* (berhias untuk menyenangkan suami), *manak* (melahirkan) dan masak (menyiapkan makanan bagi keluarga).

Dari situ muncul ungkapan *Swarga nunut neraka katut*, perempuan digambarkan tidak memiliki peran sama sekali. Hal ini menunjukkan sempitnya ruang gerak dan pemikiran perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki cakrawala di luar tugas-tugas domestik.³² Kaum perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan biologisnya. Kaum laki-laki sebaliknya,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 204.

²⁷ Nurhilaliati, "Signifikansi Peran Sosila-Ekonomi Perempuan dalam Pengembangan Masyarakat di Dasan Agung Mataram", *Ulumuna*, Nusa Tenggara Barat, Vol. VIII, edisi. 13, No. I, Januari-Juni 2004, 110.

²⁸ Sri Suhandjati, "Subordinasi Perempuan Budaya Jawa", *Dewaruci*, Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisongo, Semarang, 2002, No. 4, 74.

²⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002), 10.

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 2002), 63.

³¹ Ali Saefudin, "Wanita: Jawa dan Islam", *Dewaruci*, Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisomgo, Semarang, 2000, No. 3, 22.

³² Sri Suhandjati, "Subordinasi Perempuan Budaya Jawa", *Dewaruci*, *op. cit.*, 78.

dinilai lebih unggul dan lebih penting dibandingkan perempuan, dimana laki-laki dianggap lebih memiliki sifat pemimpin dan pengemban yang mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan.³³ Untuk memahami ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui berbagai bentuk antara lain:

1. Marginalisasi; marginalisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan hubungan kekuasaan di antara manusia melalui suatu cara sehingga salah satu kelompok manusia makin terputus aksesnya kepada sumber vital (tanah, air, modal, pendidikan, kesehatan, hak politis, dan lain-lain). Marginalisasi perempuan tumbuh dari kombinasi faktor sejarah, ekonomi dan kebudayaan serta suatu sistem ekonomi politik tertentu.

Dalam konteks gender, proses marginalisasi mengakibatkan perempuan lebih tersisihkan daripada laki-laki sehingga pada gilirannya proses marginalisasi ini akan berimplikasi pada proses *deskilling* kemampuan perempuan. Artinya, suatu proses penurunan pengetahuan dan ketrampilan. Salah satu contoh realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pekerjaan masak-memasak. Kegiatan masak-memasak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga akan diserahkan pada istri/ibu/perempuan. Tetapi jika kegiatan ini untuk keperluan restoran atau hotel (koki) yang memperoleh gaji, maka pekerjaan itu tidak lagi menjadi hak *prerogatif* perempuan, melainkan sudah dikuasai oleh laki-laki.³⁴

2. *Subordinasi* (Penomerduaan); Menurut Murniati, subordinasi dapat diartikan pandangan yang memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah daripada laki-laki. Di mana perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang mampu sehingga diberi tugas yang ringan dan mudah.³⁵ Subordinasi di sini berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuatan. Meskipun jumlah perempuan 50 persen dari penduduk bumi, namun posisi kaum perempuan ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Subordinasi tersebut tidak saja secara khusus. Terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat, tetapi

³³ Amina Wadud, *Quran menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 42.

³⁴ Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 34.

³⁵ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, Jilid 1, (Magelang: Indonesiatara, 2004), xxiii.

juga secara global. Banyak sekali contoh kasus, baik dalam tradisi, tafsir keagamaan, ataupun dalam aturan birokrasi di mana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki.³⁶

3. Stereotipe Jenis Kelamin; secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.³⁷ Di samping itu, stereotipe merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian “label” yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan. Misalnya saja perempuan dikenal sebagai penggoda, lemah dan cengeng. Stereotipe yang terjadi dalam masyarakat kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka akibatnya jika mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki-laki seperti: kegiatan politik, bisnis ataupun di pemerintahan, maka dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sementara stereotip laki-laki sebagai “pencari nafkah” apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai “sambilan atau tambahan” dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap atau tidak dihargai.³⁸
4. *Double Burden* (beban ganda); perbedaan dan pembagian gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih panjang (*double burden*). Pada umumnya, jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa hampir 90 % pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja, artinya mereka memiliki peran ganda (beban kerja ganda di rumah dan di luar rumah).³⁹

Sebagaimana contoh kehidupan petani, setelah bersama-sama pulang dari sawah sementara suami istirahat, istri masih terbebani pekerjaan membuatkan minuman, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya. Potret demikian merupakan potret yang menggambarkan bagaimana perempuan

³⁶ Mansour Fakih, *op.cit.*, 148.

³⁷ Achmad Muthali'in, *op.cit.*, 37-39.

³⁸ Mansour Fakih, *op.cit.*, 149-150

³⁹ *Ibid*, 150.

harus terbebani dengan kerja-kerja produksi dan kerja-kerja reproduksi yang bertumpuk-tumpuk.⁴⁰

5. *Violence* (kekerasan); kata "kekerasan" yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata "violence" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata 'Violence' diartikan di sini sebagai suatu serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terdiri dari dua jenis yakni kekerasan fisik dan non fisik. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipakai hanya menyangkut serangan fisik belaka, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, diskriminasi upah maupun hak-hak perempuan dalam dunia kerja.⁴¹

Dalam realita kehidupan sehari-hari seorang laki-laki yang menceraikan istrinya demi kawin dengan seorang gadis tidak dianggap salah, tetapi yang salah adalah istrinya karena tidak bisa berhias sehingga suami tertarik pada perempuan lain. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, maka perempuan ini yang bertanggung jawab, karena ia keluar dari rumahnya, dan karena tugas seorang perempuan adalah tinggal di rumah.⁴²

Pendidikan Berperspektif Gender Di Pesantren

Pendidikan berperspektif gender merupakan suatu wacana yang sering diperbincangkan, terlebih terhadap pendidikan di pesantren, menurut kyai Husain Muhammad,⁴³ seorang Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Cirebon, serta

⁴⁰ Moh Yasir Alimi, *op. cit.*, lm. 24.

⁴¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *op. cit.*, 36.

⁴² Nawal Al-Sa'dawi, Hibah Ra'uf Izzat, *Perempuan Agama & Moralitas antara Nalar dan Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi, (Jakarta: Erlangga, 2002), 82.

⁴³ Ketua Dewan Kebijakan fahmina-institute, biasa dikenal luas sebagai Kyai gender ini lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953 Menempuh pendidikan dasar tahun 1966 lalu SLTPN I Arjawinangun (1969). Kemudian menempuh pendidikan pesantren di Lirboyo Kediri sampai 1973). Pendidikan tinggi ditempuh di Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta (1980). Terakhir pernah mengenyam pendidikan di Dirasah Khasshah, Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1983. Aktif sebagai peserta dan juga sebagai narasumber, dalam berbagai pelatihan, lokakarya dan seminar, baik nasional maupun internasional. Sehari-hari aktif di berbagai kegiatan dan organisasi sosial; pondok pesantren, masjid, ormas NU, persaudaraan haji, partai politik (PKB), yayasan pendidikan dan sosial dan sejumlah NGO. Terutama Rahima, Puan Amal Hayati dan Fahmina. Aktif menulis di media lokal dan nasional dan di forum-forum internasional. Lihat femina institute, Karya Tulis Ilmiah yang pernah dipublikasikan: *Metodologi Kajian Kitab Kuning*; dalam Marzuki Wahid (ed.), *Pesantren Masa Depan*,

tokoh pergerakan gender di pesantren mengatakan sebagai lembaga pendidikan informal keagamaan, pesantren bersifat independen dan otonom dalam segala hal, dengan sosok kyai sebagai figur penentunya. Di pesantren, sikap hidup dan pandangan para santri sangat diwarnai oleh ajaran-ajaran yang mereka terima di pesantren. Sementara ajaran-ajaran yang diberikan semuanya bersumber dari teks-teks keagamaan klasik atau kitab-kitab kuning, dan semuanya dipandang sebagai doktrin keagamaan yang baku. Maka adalah hal yang pasti pula jika doktrin-doktrin keagamaan tersebut juga akan menyangkut persoalan posisi laki-laki dan perempuan serta hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pandangan umum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki.⁴⁴

Pada satu sisi, para kyai/ulama memang sering menyampaikan pandangannya bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama kedudukannya di hadapan Allah. Mereka sama-sama berkewajiban melaksanakan ibadah kepada-Nya dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar (menyerukan kebaikan dan menghindari keburukan). Demikian pula laki-laki dan perempuan berkewajiban menuntut ilmu sejalan dengan hadits nabi "menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan"⁴⁵.

Wacana pendidikan berperspektif gender yang menjadi persoalan dalam pesantren ialah tentang :

(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001). *Liq wa Takhrij Syarh Uqud al Lujain*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning, Jakarta, (Yogyakarta: LKiS, 2001). *Gender di Pesantren (Pesantren and The Issue of Gender Relation)*, dalam majalah Kultur (The Indonesian Journal for Muslim Cultures), Center for Languages and Cultures, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2002). *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik*; dalam M. Imaduddin Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma* Bahtsul Masa'il, LAKPESDAM, Jakarta, 2002. Kelemahan dan Fitnah Perempuan; dalam Moqsih Ghazali, et.all Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Rahima-FF- (Yogyakarta, LKiS, 2002). Kebudayaan yang Timpang, dalam K.M. Ikhsanudin, dkk., Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, YKF-FF, Yogyakarta, 2002. "Islam Agama Ramah Perempuan", Pembelaan Kiyai Pesantren, (Yogyakarta, LKiS, 2004). "Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujayn", FK-3 bekerjasama dengan KOMPAS, Jakarta, 2005. "Pemikir Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Fiqh Pesantren, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004). Lihat <http://femina-institute.co.id/profile>.

⁴⁴Muhammad Husain, Makalah *Pesantren dan Hak-Hak Perempuan*, <http://Daruttauhid-Cirebon.net> download 2 Agustus 2007.

⁴⁵M. Affan Hasyim et, al, *op.cit.*, 119

a. Kurikulum Pesantren;

kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan,⁴⁶ tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan. Menurut Iskandar W., kurikulum merupakan program pendidikan sekolah yang disediakan untuk siswa.⁴⁷

Kurikulum pesantren dalam hal ini pesantren “salaf” yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal, hanya mempelajari agama, bersumber pada kitab-kitab klasik meliputi bidang-bidang studi: Tauhid, Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tashawuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah, dan Tajwid), Mantiq, dan Akhlak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 1) kitab dasar, 2) kitab menengah, 3) kitab besar.⁴⁸

Kurikulum dalam jenis pendidikan pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab, jadi ada tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Setiap kitab bidang studi memiliki tingkat kemudahan dan kompleksitas pembahasan masing-masing, sehubungan dengan itu, maka evaluasi kemajuan belajar pada pesantren juga berbeda dengan evaluasi dari madrasah dan sekolah umum.

Kyai sebagai pemimpin pesantren bebas menentukan kitab apa yang akan dikaji misalnya kitab fiqih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Bila dilihat dari wacana gender kitab-kitab tersebut mengandung persoalan wanita yang terkait dengan kedudukan, fungsi peranannya selalu ter subordinasi dalam kehidupan sosial.⁴⁹

Dalam buku *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, secara mendalam diteliti bagaimana kitab-kitab klasik (meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, filsafat dan tasawuf) memperlakukan subordinasi terhadap perempuan.⁵⁰

⁴⁶Chabib Thoah, *Pengembangan Kurikulum PAI untuk Pembentukan Masyarakat Madani*, Makalah (Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999), 1.

⁴⁷ Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 6.

⁴⁸ Zamaksyari Dofir, *op.cit.* 34.

⁴⁹ Muhammad Husain, *op.cit.*, 21

⁵⁰ M. Affan Hasyim et, al, *op.cit.*, 120.

Misalnya dalam kitab Imam Al-Ghazali (w.505H/1111M) yang menjadi rujukan masyarakat muslim dunia, terutama Indonesia, dalam karya magnum opusnya, *Ihyâ ulûm ad-dîn* (1994: II/93) menggambarkan perempuan yang baik dengan pernyataan berikut;

“Bahwa semestinya perempuan itu duduk tinggal di dalam rumah saja, memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah, tidak banyak berbicara, tidak banyak bergerak naik ke atas atau turun ke bawah, tidak banyak melakukan kontak dengan laki-laki, selalu menyenangkan suami, menjaga diri, berhias dan selalu siap dalam setiap waktu untuk bisa dinikmati suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, jika terpaksa keluar setelah memperoleh izin tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhkan diri dari kerumunan dan keramaian, tidak mengenalkan diri kepada siapapun, yang harus selalu dipikirkan perempuan adalah kesucian dirinya, urusan rumah tangga, kemudian kewajiban shalat dan puasanya.”⁵¹

Menurut Husen pernyataan ini banyak juga dikutip beberapa ulama lain, seperti Imam Nawawi al-Bantani dalam Syarh *Uqûd al-Lujjain* dan Syekh Nefzawi dalam *The Perfumed Garden*. Apabila citra perempuan yang baik digambarkan seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana literatur klasik membicarakan dan mengembangkan hak-hak sosial perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Pembelajaran di Pesantren;

Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Sedangkan bagi para santri yang hanya dalam waktu singkat tinggal di pesantren, mereka tidak bercita-cita menjadi ulama, akan tetapi bertujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pesantren umumnya melakukan pemisahan tempat antara pembelajaran untuk santri putra dan santri putri. Mereka diajar secara terpisah dan kebanyakan guru yang mengajar santri putri adalah guru laki-laki. Keadaan ini tidak berlaku untuk sebaliknya.

Metode pendidikan yang digunakan masih menggunakan metode klasik yakni *wetonan*, *bandongan* dan *sorogan*. Yang menurut Husain

⁵¹ H. Rus'an, Imam Al Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Juz II, (Semarang, Wicaksana, 1984), Cet. 4, 332.

Muhammad kesemuanya itu dikenal kurang efektif dan efisien serta mematkan kreatifitas santri.

Pada beberapa pesantren lain ada yang menyelenggarakan kegiatan pendidikannya secara bersama (*co education*) antara santri putra dan santri putri dalam satu tempat yang sama dengan diberi hijab (pembatas) berupa kain atau dinding kayu. Tujuannya agar santri laki-laki dan perempuan tidak *ikhtilath* (bercampur) dan guna menjaga nilai-nilai dan tradisi agama Islam, yang menurut Zamakhsyari Dofier dalam mengantisipasi perkembangan zaman pesantren memiliki ideologi yakni “*al-Muhafadzatu ‘ala qodimi as-sholih wal akhdu ‘ala jadidil aslah*”, yakni menjaga tradisi yang baik serta mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih baik.⁵²

c. Manajemen Pesantren;

Pada tataran praksis di pesantren hak kepemimpinan di pesantren misalnya, tetap berada di tangan laki-laki. Jika kyai wafat, maka penggantinya juga anaknya yang laki-laki, meskipun anak kyai yang pertama atau yang tertua adalah perempuan, bahkan meski mereka mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup dan lebih baik dari anak laki-laki. Jika kyai tidak mempunyai anak kecuali perempuan, maka hak kepemimpinan berikutnya, biasanya tetap tidak berpindah kepada anak perempuan, melainkan diserahkan kepada saudaranya yang laki-laki atau menantunya yang “alim” (pandai).

Persoalan yang sama juga berlaku dalam pemilihan kepala atau lurah pesantren. Kepala atau lurah pesantren adalah laki-laki. Dalam keorganisasian santri yang menggabungkan laki-laki dan perempuan atau dalam kepanitian hari-hari besar Islam di pesantren, perempuan selalu dilibatkan dalam posisi seksi konsumsi dan penerima tamu. Mereka belum pernah diberikan kesempatan menduduki jabatan pengambil kebijakan pertama atau ketua. Paling tinggi adalah wakil ketua dua, wakil sekretaris atau wakil bendahara. Ini adalah realitas di pesantren sampai hari ini, ketika lembaga ini mengorganisasi santri laki-laki dan perempuan.⁵³

⁵² Zamakhsyari Dofir, *op cit.* 31.

⁵³ Muhammad Husain, *op. cit.*, 12

Catatan Akhir

Konsep gender yang terbangun dalam pondok pesantren lebih dikenal dengan istilah, diantaranya adalah:

1. Setara (*musawamah*); kesetaraan disini adalah kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dunia ini adalah sama, setara dalam artian laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hak dan kedudukan yang sama baik disektor domestik maupun publik, asalkan tidak melalaikan peranannya di sektor domestik. Misalnya istri boleh bekerja diluar rumah tapi tidak melalaikan kewajiban untuk mengurus anak dan keluarga.
2. Persaudaraan (*ukhuwah*); laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrati, meskipun demikian perbedaan tersebut tidaklah harus diwarnai dengan perpecahan antar sesama, tetapi harus dijalin dengan ikatan persaudaraan (*ukhuwah*), dan perlu ada kesadaran bahwa antara muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara. “*Akhul muslimu ‘alal muslimi ikhwatun*”.
3. Keadilan (*al-‘adalah*); setiap manusia di muka bumi ini pasti menghendaki keadilan disegala bidang, demikian juga kedudukan perempuan dan laki-laki, keadilan yang diinginkan ialah memperoleh hak dan kedudukan yang sama. Seperti dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Moderat (*tawasut*); pengertian moderat dalam hal ini adalah upaya penyelesaian masalah yang lebih mengedepankan dan menyepakati jalan tengah sebagai solusi utama. Sikap yang moderat dalam persoalan gender bisa dipahami sebagai upaya untuk saling menghargai dan melihat sudut pandang gender dari berbagai aspek, misalnya; sosial, kultural, politik.
5. Seimbang (*tawazun*); seimbang yang dimaksudkan disini ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan ada keseimbangan dan *balance* (hubungan yang serasi), keseimbangan untuk memperoleh akses dan partisipasi dalam berbagai kegiatan.
6. Penghormatan sesama (*tahiyyah*); dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ada sikap saling penghormatan antara sesama, penghargaan dan penghormatan itu diberikan bagi mereka yang memiliki prestasi dan keunggulan dengan yang lain.

7. Toleran (*tasamuh*); adanya sikap toleran (saling menghargai), sikap ini dikembangkan dalam ranah praktek sosial dan pergaulan antar sesama baik di lingkungan pondok maupun kehidupan bermasyarakat
8. Saling menolong (*ta'awun*); tolong menolong antar sesama serta tidak memperdulikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta kedudukan merupakan hal yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itupun harus dijadikan sebagai suatu perbuatan yang harus dijunjung tinggi.
9. Pluralitas/keragaman (*ta'addud*); Allah menciptakan manusia beranekaragam dan berbeda jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, Setiap kelompok dan individu memiliki kebanggaan terhadap jatidiri masing-masing. Namun, ini tidak berarti harus menjelekkkan orang atau kelompok lain, tapi justru ia harus ditransformasikan menjadi elemen yang dapat memperkaya khazanah kehidupan manusia. Pluralitas dan keberagaman sebagai suatu hikmah dalam membangun ukhuwah sehingga timbul hasrat ingin mengenal dan memahami satu-sama lain.

Dari kesembilan konsep yang dipahami dipondok pesantren tersebut, yang kesemuanya itu berusaha untuk diintegrasikan dalam pendidikan pesantren. Dan konsep nilai-nilai dasar ini dapat dijadikan pegangan terutama ketika membaca teks yang cenderung tidak bersetaraan, baik yang ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, bila ada perbedaan terutama sebagaimana terekam dalam kitab fiqih atau kitab-kitab kuning lain, maka harus dipahami bahwa teks-teks tersebut bukan ditujukan sebagai legitimasi untuk melakukan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan.

Daftar Rujukan

- Al Ghozali, Imam, H. Rus'an, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Juz II, (Semarang, Wicaksana, 1984), Cet. 4,
- Alimi, Moh. Yasir, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2002).
- Al-Sa'dawi, Nawal Hibah, Izzat, Ra'uf, *Perempuan Agama & Moralitas antara Nalar dan Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Azeem, Sheriff Abdel, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, terj. Sri Suhandjati dan Rusman, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

- Baidan, Nashruddin, Tafsir bi Al-Ra'yi; *Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*, Ahmad Baidhawi (ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999).
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Istiqro' Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 02, Nomor, 01, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alwaah, 1997).
- Dhofier, Zamaksyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 10.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 2002)
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Ghozali, Abd. Rohim, "Inklusifitas Kebenaran Agama", *Atas Nama Agama dalam Dialog Bebas Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 51.
- Gunaryo, Achmad, "Kesetaraan Jender: Antara Cita dan Fakta", Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 3-4.
- Husain, Muhammad, *Makalah Pesantren dan Hak-Hak Perempuan*, <http://Daruttauhid-Cirebon.net> download 2 Agustus 2007.
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1982).
- Jalaluddin, Imam, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Offset, 1990).
- Marhumah, "Anjuran Menikah", Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (eds.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rohmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita Sunan Kalijogo Yogyakarta dan The ford Foundation, 2003).
- Muhsin, Aminah Wadud, *Wanita Dalam al-Quran*, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender*, Jilid 1, (Magelang: Indonesiatara, 2004).

- Muthali'in, Achmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).
- Nurhilaliati, "Signifikansi Peran Sosila-Ekonomi Perempuan dalam Pengembangan Masyarakat di Dasan Agung Mataram", *Ulumuna*, Nusa Tenggara Barat, Vol. VIII, edisi. 13, No. I, Januari-Juni 2004.
- Rosyidi, Suherman, *Wanita dalam Doktrin Islam, Yahudi dan Kristen*, (Surabaya; Target Press, 2000).
- Saefudin, Ali, "*Wanita: Jawa dan Islam*", Dewaruci, Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisomgo, Semarang, 2000, No. 3.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Shaleh, Qomaruddin, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, A. Dahlan dan M. Zaka al-Farisi (eds.), (Bandung: Diponegoro, 2000).
- Shihab, Muhammad Quraish, "*Konsep Wanita menurut Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam*", *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual; Kumpulan Makalah Seminar*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Terj. Toni B. Febriantono, (Jakarta: Pustaka Proemethea, 2003).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Suhandjati, Sri, "Subordinasi Perempuan Budaya Jawa", *Dewaruci*, Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisonggo, Semarang, 2002, No. 4.
- Sukri, Sri Suhandjati, "*Dialog Islam dengan Budaya Lokal Implikasinya Terhadap Penulisan Sejarah Androginis*", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam Disampaikan di Hadapan Senat Terbuka IAIN Walisonggo, Semarang, 30 April 2005.
- Thoaha, Chabib, *Pengembangan Kurikulum PAI untuk Pembentukan Masyarakat Madani*, Makalah (Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisonggo, 1999).
- Tholkhah, Imam, dkk., *Membuka Jendela Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Umar, Nasaruddin, "Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Gender", Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadian Gender*, Jilid. 2, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisonggo dan Gama Media, 2002).

- Wadud, Amina, *Quran menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).
- Wahid, Abdurrahman, *Pesantren sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Wiryokusumo, Iskandar dan Mulyadi, Usman *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).